

meluasnya dukungan publik

Laporan Tahunan.
2009





Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Jl. Pedati Raya No. 20 Rt. 007/09 Jakarta Timur 13350 - INDONESIA
Phone : 62 (21) 819 1623 Fax : 62 (21) 850 0670 - 8590 5262
e-mail: yappika@indosat.net.id
www.yappika.or.id



1	Kata Pengantar dari Direktur Eksekutif YAPPIKA	
3	Kata Pengantar dari Ketua Pembina YAPPIKA	
5	Angin Segar dari UU Pelayanan Publik	
7	Membuka Ruang Dialog antar Aktor Masyarakat Sipil, Pemerintah dan Swasta di Kabupaten melalui Indeks Masyarakat Sipil	
9	ANCORS - Mengembangkan Ketrampilan Advokasi dan Membangun Tata Kelola Internal Lembaga ANCORS - Mengembangkan Ketrampilan Advokasi dan Membangun Tata Kelola Internal Lembaga	
11	Memperkuat Kemandirian melalui Penggalangan Donasi Publik	
13	<i>The Asia Roundtable for Community of Democracies (CD)</i> <i>Non-governmental Process</i>	
15	Upaya untuk Mengabarkan Pengalaman Terbaik Masyarakat Sipil Indonesia dalam Mengembangkan Demokrasi ke Forum Global	
17	Sinergi Kerja-Kerja YAPPIKA dalam Kemitraan • Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh 17 • Advokasi RUU Pelayanan Publik 18 • Pemanfaatan IMS dalam Program ACCESS Tahap II 18 • Pelibatan Relawan 18	
19	Laporan Keuangan	

Kata Pengantar dari Direktur Eksekutif YAPPIKA

Fransisca Fitri Kurnia Sri



Membangun kerja secara kemitraan atau kolaboratif dengan berbagai institusi sudah menjadi pilihan YAPPIKA sejak awal. Dengan pendekatan ini, YAPPIKA berupaya membangun hubungan dinamis dengan mitra OMS, jaringan, lembaga donor, atau bahkan dengan institusi pemerintah yang berbasis pada nilai, tujuan, pemahaman dan manfaat bersama dalam kerangka pembagian kerja yang jelas dan saling menghormati. Dengan menggunakan pendekatan kemitraan atau kolaborasi ini, membuka peluang bagi YAPPIKA bersama dengan organisasi lain untuk berupaya bersama, dengan menekankan pentingnya prinsip mutualistik yang saling memberi dan menerima, membangun hubungan yang seimbang, saling memiliki, saling menghormati, partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan serta saling menjaga transparansi dan akuntabilitas secara kolektif. Laporan tahunan ini akan memaparkan berbagai pengalaman YAPPIKA sepanjang April hingga Desember 2009 dengan titik berat paparan pada sinergi kerja YAPPIKA dalam kemitraan dengan pihak lain.

Dalam Program ANCORS, kolaborasi dibangun bertingkat mulai dari tingkat provinsi dengan dua organisasi sumber daya, yaitu Aceh *Development Fund (ADF)* dan *Inspiring Management for People's Action (IMPACT)*, juga dengan beberapa organisasi jaringan. Kemitraan tingkat berikutnya dibangun dengan 14 mitra OMS di 6 kabupaten. Sementara YAPPIKA juga membangun kemitraan dengan USC Canada/CIDA sebagai penyangga dana program ini. Relasi kemitraan yang dibangun setara dalam program ini membuat komunikasi seluruh pihak nyaman dan saling memberikan dukungan.

Selanjutnya, laporan tahunan ini memuat tentang pengalaman kerja advokasi RUU Pelayanan Publik yang didukung oleh Yayasan TIFA. Advokasi ini merupakan kerja YAPPIKA secara berjejaring dengan 33 lembaga dan akademisi di Jakarta dan 7 simpul wilayah, yang menamakan diri Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (Mp3). Sinergi kerja yang dibangun YAPPIKA sebagai sekretariat mampu merawat keberlanjutan jaringan advokasi ini hingga berumur lebih dari 4 tahun. Perjalanan panjang pengawasan RUU

Pelayanan Publik ini telah membuahkan hasil dengan disetujuinya RUU tersebut menjadi UU pada rapat paripurna DPR pada tanggal 23 Juni 2009. Tanggal tersebut cukup monumental karena bertepatan dengan peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional. Secara umum substansi UU cukup progresif dengan memberikan janji jaminan pemenuhan pelayanan publik yang layak dan memberikan ruang partisipasi masyarakat cukup luas.

Pemanfaatan Indeks Masyarakat Sipil di tingkat kabupaten menjadi bagian dari upaya YAPPIKA sebagai mitra strategis Program ACCESS Fase II untuk berkontribusi pada tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis (TKLD). Di 8 kabupaten wilayah kerja lama, yaitu kabupaten yang telah menjadi wilayah kerja program ACCESS Fase I dan berlanjut pada program ACCESS Fase II, dilakukan pengkajian ulang hasil IMS tahun 2007. Sementara di 8 kabupaten wilayah kerja baru, yaitu kabupaten/kota yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah kerja program ACCESS Fase I, lokakarya IMS cukup berhasil dalam mempertemukan berbagai spektrum OMS dengan stakeholder kuncinya untuk berefleksi tentang peran-peran yang seharusnya dimainkan oleh OMS dalam konteks TKLD.

Berikutnya adalah pengalaman menggalang donasi publik untuk kerja-kerja advokasi. Ini merupakan pengalaman baru YAPPIKA. Penggalangan donasi publik dilakukan dengan berkolaborasi bersama Dompot Dhuafa dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam tema “Pastikan Sekolahmu Bebas Pungutan, Donasi Gerakan Anti Korupsi agar Sekolahmu Gratis”. Hasil kerja sama selama 3 bulan ini berhasil mengumpulkan donasi sekitar Rp. 80 juta. Angka

tersebut bukan jumlah yang sangat luar biasa, tetapi cukup menjanjikan bahwa publik memang mau mendonasikan uangnya untuk kegiatan advokasi dalam isu demokrasi. Pengalaman pendek ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk membumikan dan mengemas isu agar dapat diterima oleh publik tampaknya menjadi salah satu kunci kesuksesan penggalangan dana publik.

Terakhir, laporan tahunan ini akan memaparkan tentang upaya YAPPIKA mengembangkan jaringan ke tingkat regional. Pertama, YAPPIKA bertindak sebagai mitra penyelenggara kegiatan *the Asia Roundtable for Community of Democracies (CD) Non-governmental Process* yang diselenggarakan oleh *The World Forum for Democratization in Asia* (WFDA). Kedua, YAPPIKA bersama aktivis OMS dari 6 lembaga lain dengan dukungan dari Yayasan TIFA hadir dalam *WFDA Biennial Meeting and Global Forum on Modern Direct Democracy* di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 13-18 September 2009. Kesempatan ini sangat berharga untuk mulai mengkapitalisasi aset-aset OMS dalam isu demokrasi ke tingkat global dan berkontribusi dalam memajukan demokrasi, mengenalkan pengetahuan dan praksis demokrasi Indonesia dan membangun relasi dan jaringan untuk mendukung kelanjutan kerja-kerja dalam isu demokrasi di Indonesia.

Akhir kata, bagi YAPPIKA membangun kemitraan yang setara lebih merupakan “sebuah proses dinamis” dari pada “sebuah hasil”. Akan selalu membutuhkan pilihan strategi yang sesuai, pemilihan waktu yang tepat, dan penggunaan bahasa yang pas untuk menjaga dinamikanya. Saat ini masih jauh dari sempurna, meskipun telah menumbuhkan benih-benih dukungan publik luas.

Kata Pengantar dari Ketua Pembina YAPPIKA

Dwi Astuti



Laporan tahunan YAPPIKA 2009 yang sedang Anda baca berisi proses dan perkembangan penting dari seluruh upaya YAPPIKA dalam mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya. YAPPIKA meyakini bahwa hanya dengan masyarakat yang demokratis dan mandiri di tingkat lokal sebagai sumber kehendak dan aspirasi maka demokrasi sejati di Indonesia akan terwujud. Demokrasi yang tumbuh dan berkembang dari bawah, berbasis pada masyarakat sipil yang terdidik dan terorganisir. Juga adalah demokrasi yang menghargai hak perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak eksistensi diri sebagai manusia agar dapat membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kehidupan yang adil.

Berlandaskan kehendak itulah, YAPPIKA telah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan peluang bagi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level kebijakan baik di level lokal maupun nasional.

Melalui proses ini diharapkan mampu menjadi kanal aspirasi langsung dari masyarakat di tengah buntutnya penyaluran aspirasi rakyat yang diwakilkan melalui DPR. Atau dengan kata lain, upaya ini diharapkan mampu menjadi alternatif dari mainstream demokrasi yang cenderung menjadi alat politik para elit untuk menciptakan hegemoni atas sistem sosial- budaya, sosial- politik dan sosial- ekonomi.

Tantangan semakin besar ketika krisis ekonomi global secara serta merta berimbas pada peta politik bantuan internasional. Dampak yang sangat terasa adalah berkurangnya secara signifikan dukungan lembaga donor kepada upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh NGO. Selain itu, sistem baru yang dibangun dalam penyaluran dana telah menimbulkan persaingan baik antar NGO nasional maupun NGO nasional dengan NGO Internasional (INGO). Namun demikian, YAPPIKA menyikapinya dengan jitu yaitu melalui upaya kreatif menggalang dana publik. Tak mudah, tapi YAPPIKA telah memulai.

Dalam laporan tahunan ini dipaparkan berbagai hasil penting yang telah dicapai YAPPIKA pada tahun 2009 antara lain disahkannya RUU Pelayanan Publik menjadi UU Pelayanan Publik setelah YAPPIKA bersama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menempuh upaya panjang agar masyarakat sipil dapat turut serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengesahan ini selain sebagai hasil perjuangan panjang YAPPIKA bersama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (Mp3), juga sekaligus tantangan bagi YAPPIKA untuk terus mengawal implementasi UU ini agar berjalan seperti yang diharapkan. Secara simultan, di tingkat lokal YAPPIKA juga menginisiasi terbukanya ruang dialog antara masyarakat sipil, pemerintah dan pihak swasta sebagai tiga pilar

pembangunan dan demokrasi. Selain itu, di tahun 2009/2010 ini YAPPIKA dalam upayanya untuk mengambil bagian dalam percaturan demokrasi telah mengambil peran dalam berbagai pertemuan di tingkat Asia dan Internasional.

Terimakasih kepada seluruh Pengurus dan Pelaksana atas capaian yang telah diraih pada periode ini. Capaian ini telah menguatkan keyakinan kita untuk meneruskan perjalanan ke depan. Mari kita saling menyemangati dan bersyukur kepada Tuhan YME atas kebersamaanNya dalam setiap langkah kita. Tak lupa, terimakasih kepada seluruh mitra yang tak surut memberikan solidaritas. Kuatkan barisan, hadapi tantangan!

Angin Segar dari UU Pelayanan Publik



“

“YAPPIKA konsisten memperkuat gerakan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak politik dan sosialnya.”

Hayyi Muhammad, Direktur *Indonesia Procurement Watch*

Perjalanan panjang pengawalan Rancangan Undang Undang (RUU) Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) akhirnya berbuah cukup manis. Pada tanggal 23 Juni 2009, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU Pelayanan Publik yang telah dibahas oleh Komisi II. Selanjutnya, RUU tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 18 Agustus 2009 menjadi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dicatat sebagai lembar negara. Kehadiran UU Pelayanan

Publik seakan melengkapi dua UU lainnya, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Ombudsman. Ketiganya menjadi payung hukum yang kuat dan saling melengkapi bagi partisipasi masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Walaupun substansi UU tersebut belum sempurna, namun secara umum substansi UU termasuk cukup progresif memberikan janji jaminan pemenuhan pelayanan publik yang layak dan memberikan ruang partisipasi masyarakat cukup luas. Paradigma pelayanan publik yang digunakan dalam UU No. 25 tahun 2009 adalah paradigma pemenuhan hak. Muatan hak dasar terutama dapat dilihat dari beberapa aturan hukum yang menjadi rujukan konsideran, diantaranya; UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM (pasal 27, 28A, 28B, 28D, 28H, 28I dan pasal 34) dan UU nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional EKOSOB. Dari sudut ruang lingkup, aturan mengenai definisi penyelenggara mencakup pelayanan publik yang diselenggarakan

oleh pemerintah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk negara maupun badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Muatan substansi ini memberikan kejelasan bagi masyarakat tentang kepada siapa saja tuntutan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari sudut partisipasi, UU Pelayanan Publik memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasinya. Misalnya, UU PP mewajibkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan (Pasal 20) serta sampai pada evaluasi Standar Pelayanan (Pasal 39 Ayat 1), masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan publik (Pasal 39 Ayat 3), melakukan pengawasan eksternal berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 29 Ayat 3). Terkait dengan pengaduan, Bab VIII UU Pelayanan Publik mengatur bahwa pengaduan dapat melalui tiga jalur, yaitu internal (unit layanan), eksternal (melalui Ombudsman) dan Dewan Perwakilan

Rakyat. Khusus pengaduan melalui Ombudsman, UU No. 25 Tahun 2009 melalui Pasal 50 Ayat 5 mengatur satu pasal yang sifatnya memperkuat UU Ombudsman Republik Indonesia (ORI) No. 37 Tahun 2008, yaitu dalam penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. Dalam UU Ombudsman, penyelesaian pengaduan hanya sampai pada mediasi.

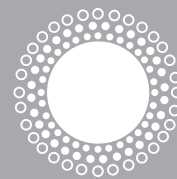
Substansi cukup progresif lainnya dari UU Pelayanan Publik adalah adanya pengaturan khusus bagi kelompok rentan yang tertuang dalam Pasal 29 dan 30. Pada ayat 1 misalnya berbunyi: Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

“

"Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan yang tergabung dalam MP3, yang terus mengawal proses pembahasan hingga disahkannya UU Pelayanan Publik. Masukan maupun kritik MP3 dalam advokasi UU Pelayanan Publik kadang membuat beberapa anggota DPR sedikit marah, namun semua akhirnya berjalan baik hingga UU disahkan. Ketelatenan MP3 yang selalu menanyakan tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan oleh UU Pelayanan Publik membantu kami untuk menjadikan pembahasan RPP tersebut sebagai salah satu prioritas perhatian."

Koeshardo, Pelaksana Tugas Deputy Program Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara

Membuka Ruang Dialog antar Aktor Masyarakat Sipil, Pemerintah dan Swasta di Kabupaten melalui Indeks Masyarakat Sipil



“

“Alat IMS akan coba kami manfaatkan di instansi untuk proses perencanaan dan pengukuran kegiatan-kegiatan program BPMD.”

H. Hamsir (BPMD) dalam Lokakarya IMS
Kab Gowa 24-28 Juni 2009

Pada periode 11 Februari – 11 Agustus 2009, YAPPIKA dengan dukungan Program ACCESS Fase II, melakukan pengukuran tingkat kesehatan masyarakat sipil menggunakan sebuah alat penelitian yang disebut Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di 16 kabupaten wilayah kerja program ACCESS. Dari 16 kabupaten tersebut, 8 kabupaten di antaranya pernah dilakukan pengukuran IMS pada tahun 2004 dan 2007, yaitu Kabupaten

Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur. Pengukuran IMS pada tahun 2009 di 8 kabupaten tersebut merupakan kaji ulang dari hasil IMS tahun 2007. Sementara itu 8 kabupaten lainnya adalah kabupaten baru yang belum pernah dilakukan pengukuran IMS, yaitu Kabupaten Gowa, Takalar, Kota Bau Bau, Buton Utara, Bima, Dompu, Kota Kupang dan Timor Tengah Selatan.

IMS dikembangkan oleh CIVICUS, sebuah organisasi non-profit yang berbasis di Afrika



Indeks Masyarakat Sipil, Gowa Sulawesi Selatan

Selatan. Pada periode 2008 – 2010, sebanyak 56 negara mengimplementasikan IMS (<http://www.civicus.org/csi/csi-phase-two08>), termasuk di Indonesia yang dilakukan oleh YAPPIKA. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat sipil dilihat dari struktur internalnya; lingkungan eksternalnya; nilai-nilai yang dipromosikan dan dipraktekkan serta dampak kerja-kerja masyarakat sipil terhadap masyarakat, perubahan kebijakan maupun tanggungjawab pemerintah dan swasta.

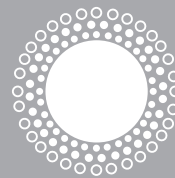
YAPPIKA melakukan modifikasi alat IMS untuk disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. Alat IMS biasanya digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat sipil secara nasional, namun YAPPIKA mengembangkannya untuk melakukan pengukuran dalam cakupan kabupaten. YAPPIKA melihat bahwa IMS dapat menjadi alat untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam membangun tata pemerintahan lokal yang demokratis. IMS yang dikembangkan YAPPIKA bukan hanya sebagai sebuah riset/kegiatan yang menghasilkan pengetahuan semata, namun juga diarahkan untuk menjadi “alat” yang berorientasi aksi dan diharapkan memiliki dampak politis, yaitu menguatnya masyarakat sipil untuk mendorong perubahan/transformasi sosial di kabupaten.

Kegiatan IMS tahun 2009 telah menghasilkan 3 aspek penting, pertama, membuka ruang dialog antar masyarakat sipil dan

antara masyarakat sipil dengan negara dan sektor pasar yang berpengaruh terhadap MS atau dipengaruhi oleh MS. Dialog tersebut menjadi arena evaluasi serta refleksi terhadap kondisi/status MS serta merancang aksi bersama untuk perbaikan MS secara partisipatif di 16 kabupaten; kedua, menghasilkan intan IMS sebagai gambaran kondisi terkini tingkat kesehatan masyarakat sipil kabupaten dan rekomendasi untuk menyehatkan kondisinya; ketiga, menjadi strategi untuk mengawali terjadinya pertautan (*engagement*) antar aktor-aktor pembangunan di kabupaten; yaitu OMS, negara, dan sektor pasar.

Lokakarya IMS di 16 Kabupaten tersebut berhasil mempertemukan stakeholder kunci kabupaten seperti pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, legislatif, swasta, tokoh adat, dan LSM. Lokakarya ini menjadi ajang dialog bagi pengembangan visi kabupaten ke depan, yang mampu memperkecil gap pengetahuan peserta lokakarya atas situasi kabupaten dan membuat strategi bersama untuk pencapaian Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD). Dalam batas tertentu, pola komunikasi antar elemen peserta juga berubah menjadi lebih saling menghargai dan saling menyemangati daripada saling menyalahkan dan menjatuhkan. Semua itu memberikan titik awal proses *engagement* antara aktor masyarakat sipil dengan kalangan pengambil keputusan di kabupaten.

ANCORS - Mengembangkan Ketrampilan Advokasi dan Membangun Tata Kelola Internal Lembaga



Diskusi Komunitas Yayasan Papan, Aceh Barat

Program peningkatan kapasitas dan peran OMS Aceh (ANCORS - *the Acehnese Civil Society Organization Strengthening Project*) merupakan program tiga tahun yang dirancang untuk berkontribusi membangun kembali dan memperkuat sistem tata pemerintahan lokal yang baik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Program ini dilakukan dengan cara menguatkan kapasitas OMS lokal agar mampu menyuarakan dan aktif mengambil bagian dalam membangun kembali komunitasnya.

Program ANCORS yang diluncurkan pada bulan April 2006 dan telah berakhir pada bulan Juni 2009 ini, dilaksanakan melalui kerja sama antara USC Canada/CIDA dengan YAPPIKA, dan berkolaborasi dengan dua organisasi sumber daya di tingkat provinsi yaitu *Aceh Development Fund* (ADF) dan *Inspiring Management for People's Action* (IMPACT). Fokus wilayah kerja program ini berada di Banda Aceh dan enam kabupaten lain, yaitu Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Singkil. Di Banda Aceh selain berkolaborasi dengan dua organisasi sumber daya, program ini bermitra dengan organisasi jaringan seperti Forum LSM Aceh, Kelompok Kerja untuk Transformasi Gender Aceh (KKTGA), dan Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF). Sementara di enam kabupaten lain, program bermitra dengan empat belas OMS kabupaten, yaitu PUGAR, YPSDI, LPPM (Aceh Besar); PERAK, PASKA (Pidie); LSPENA, BIMA (Bireuen); MASIF, MATARADJA (Aceh Jaya); YPK, PAPAN, FLOWER Aceh Barat (Aceh Barat); RTA, DAUN (Singkil). Mitra-mitra kerja ini memilih fokus isu pelayanan publik dengan tema pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Tujuan jangka panjang program ini adalah: (1) Menguat dan meningkatnya kapasitas OMS dalam mengembangkan partisipasi publik secara inklusif, baik laki-laki maupun perempuan, dan mempengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan pemerintah daerah maupun pihak-pihak strategis lainnya; dan (2) Meningkatnya kapasitas resource organization di tingkat propinsi dalam mendukung peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat.

Program ANCORS sukses membangun kapasitas mitra kabupaten dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, melakukan analisis kebijakan dan memformulasikan rekomendasi kebijakan, membangun jaringan, membangun dan mempengaruhi opini publik, membangun aliansi strategis dan membangun kemampuan mengelola program serta keuangan secara lebih efektif. Beberapa pembelajaran dan hasil utama program ANCORS, di antaranya 41 dokumen usulan kebijakan yang telah diajukan oleh para mitra di tingkat kabupaten maupun provinsi di Aceh, dipamerkan dalam acara Pekan Kanada yang diselenggarakan oleh CIDA dan Kedutaan Kanada pada tanggal 23 – 27 Februari 2009. Lebih jauh lagi, penguatan kapasitas tata kelola internal lembaga dan pengorganisasian masyarakat telah berkontribusi pada semakin menguatnya kapasitas Yayasan Bima, sebuah LSM di Bireuen yang didirikan bersamaan dengan awal

pelaksanaan program ANCORS dan terpilih menjadi salah satu mitra program, dalam pengorganisasian warga untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Musrenbang dan penganggaran di Kabupaten Bireuen, walaupun tidak ada lagi dukungan dari program. Sementara itu di tingkat provinsi, ADF dan IMPACT mengakui bahwa penguatan tata kelola internal lembaga, termasuk di antaranya mekanisme transparansi dan akuntabilitas, telah turut berkontribusi dalam menjadikan kedua lembaga ini semakin dipercaya oleh para pihak, baik dari kalangan OMS, masyarakat, perguruan tinggi, Pemda, DPRA dan lembaga dana.

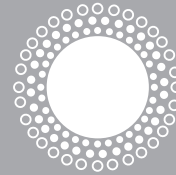
Pembelajaran penting dari ANCORS yang dapat diterapkan dalam program pengembangan kapasitas OMS serupa adalah bahwa kerja advokasi yang efektif membutuhkan lebih dari mengembangkan ketrampilan teknis untuk melakukan advokasi kebijakan. Tata kelola internal organisasi juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Kerja advokasi mitra kabupaten lebih kuat ketika peran dan tanggung jawab masing-masing staf jelas dan memiliki fungsi sebagai tim kerja. Melakukan refleksi atas pengalaman melakukan kerja-kerja advokasi juga merupakan bagian penting dalam mengembangkan kapasitas OMS. Proses refleksi dan sharing sangat berguna untuk belajar dari pengalaman satu dengan yang lain, sehingga penguatan kapasitas tidak hanya berasal dari kegiatan pelatihan dan bantuan teknis.

“

“Dukungan YAPPIKA melalui program ANCORS di Aceh telah membuka kesempatan bagi OMS untuk terlibat aktif dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Selain itu juga turut berkontribusi terhadap terbangunnya komunikasi yang efektif antara OMS kepada pemerintah Aceh maupun sebaliknya dari pemerintah kepada OMS dalam proses-proses penyusunan kebijakan daerah. Dukungan serupa perlu diteruskan dan diperluas, tidak hanya di Aceh namun di kabupaten/kota di provinsi lainnya.”

Afrizal Tjoetra, Direktur Eksekutif Aceh Development Fund

Memperkuat Kemandirian melalui Penggalangan Donasi Publik





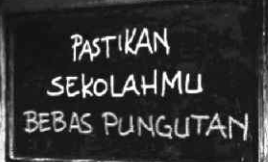
021.8191623

BNI. Cab. Wolter Monginsidi
006.436.0742 a/n Yayasan ICW
Bank Mandiri
006.00.0036529.0 a/n YAPPIKA
BCA. Cab. Pondok Indah
237.304.7171 a/n Yayasan Dompeth Dhuafa





**DONASI
GERAKAN ANTI KORUPSI
AGAR SEKOLAHMU GRATIS**



Publikasi Penggalangan Dana YAPPIKA - ICW - Dompeth Dhuafa di halaman muka website YAPPIKA, 2009

Penggalangan dana publik merupakan praktek yang mungkin belum biasa dilakukan oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di isu advokasi kebijakan. Dukungan kerelawanan dalam bentuk tenaga maupun dukungan non-cash dari publik sering diperoleh. Namun dalam konteks dukungan dana, cukup banyak LSM yang masih tergantung pendanaan dari lembaga dana untuk mendukung perguliran berbagai aktivitas advokasi guna menggapai

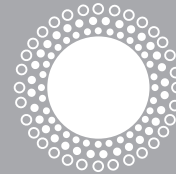
berbagai cita-cita perubahan sosial yang adil, di tengah iklim demokrasi yang semakin membuka ruang gerak masyarakat sipil. Kondisi ini cukup rentan bagi keberlanjutan kalangan LSM, walaupun ada juga kasus-kasus gerakan LSM untuk advokasi kebijakan yang tak didukung oleh pendanaan lembaga donor.

Interaksi antara YAPPIKA dan Dompeth Dhuafa yang telah berjaln cukup lama, mendorong perkembangan baru pada YAPPIKA. Sebuah

keyakinan diri pun muncul untuk memulai menggalang donasi publik untuk membiayai kerja-kerja advokasi kebijakan. Sebuah kerja yang hasilnya sulit untuk dirasakan dalam waktu singkat jika dibandingkan dengan kerja-kerja memberikan bantuan makanan, obat-obatan atau bantuan langsung tunai. YAPPIKA menggandeng *Indonesia Corruption Watch* (ICW) untuk melakukan uji coba penggalangan donasi publik. Akhirnya, pada pertengahan Juli – September 2009, YAPPIKA – ICW – Dompot Dhuafa, berkolaborasi menggalang donasi public dengan mengangkat isu anti korupsi di sekolah dengan tema “Pastikan Sekolahmu Bebas Pungutan, Donasi Gerakan Anti Korupsi agar Sekolahmu Gratis”. YAPPIKA dan ICW pun magang di Dompot Dhuafa selama satu bulan untuk belajar teknik penggalangan dana publik. Mulai dari perumusan pesan utama secara bersama-sama, membuat strategi penggalangan dana publik, membuat proposal *direct mail* kepada individu-individu, mengumpulkan alamat calon donatur individu, promosi ke media massa dan perusahaan.

Hasil kerja selama tiga bulan ternyata cukup menggembirakan. Donasi publik yang diperoleh mencapai sekitar Rp 80 juta dan dana tersebut digunakan untuk melakukan pendampingan dan advokasi Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) yang partisipatif untuk mencegah korupsi. Donasi publik ini merupakan bukti sekaligus harapan baru bahwa gerakan advokasi mempunyai potensi untuk memperoleh donasi publik. Dukungan publik adalah legitimasi, representasi suara dan kepentingan masyarakat yang sama-sama gelisah terhadap kondisi buruk bangsa ini dan ingin berbuat sesuatu untuk terlibat mengatasinya. Dan YAPPIKA ingin menekuni ranah baru ini guna memulai memperkuat kemandirian serta ingin menginspirasi lembaga lain untuk berbuat hal serupa.

The Asia Roundtable for Community of Democracies (CD) Non-governmental Process



Diskusi Panel, *the Asia Roundtable Community of Democracy*, Jakarta

The World Forum for Democratization in Asia (WFDA) menyelenggarakan kegiatan *the Asia Roundtable for Community of Democracies (CD) Non-governmental Process* di Jakarta, tanggal 30 April – 1 Mei 2009. YAPPIKA bertindak sebagai mitra penyelenggara kegiatan tersebut. Tema *Asia Roundtable CD* kali ini adalah “Implikasi Krisis Keuangan dan Finansial terhadap Perkembangan Demokrasi di Asia”. Sementara itu biaya kegiatan didukung oleh Taiwan Foundation for Democracy.

Community of Democracies (CD) adalah sebuah forum tingkat menteri antar negara yang beranggotakan pemerintah demokratik atau sedang berupaya untuk mendorong demokrasi. CD melakukan pertemuan dua tahunan (biennial) sejak tahun 2000, dimana pertemuan pertama tersebut diselenggarakan di Warsawa Polandia. Bersamaan dengan berkembangnya proses-proses dialog antar pemerintah atau disebut “*track satu*”, berkembang pula sebuah proses yang disebut “*track dua*” dari aktor-aktor non-pemerintah atau organisasi masyarakat sipil (OMS). Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ‘*track dua*’ ini, bertujuan untuk membangun konstituensi yang lebih luas terhadap *Community of Democracies* sekaligus membawa perspektif regional ke tingkat global. Pertemuan regional antar OMS sebelumnya telah diselenggarakan di Taiwan dan India.

Pada tahun 2009 ini, Jakarta terpilih sebagai tempat pertemuan regional Asia untuk ‘*track dua*’ karena pencapaian demokrasi di Indonesia yang cukup maju dan meningkatnya

peran Indonesia di kancah upaya demokrasi internasional, di mana Bali Forum menjadi contoh utamanya. Pertemuan Jakarta kali ini, diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran demokrasi dari berbagai negara yang kemudian disampaikan pada pertemuan *Community of Democracies* tingkat menteri pada tanggal 7 – 12 Juli 2009 di Lisbon Portugal.

Konferensi CD Non-pemerintah di Jakarta dihadiri oleh perwakilan OMS pegiat demokrasi dari 15 (lima belas) negara, yaitu Indonesia, Filipina, Taiwan, China, Maldives, India, Pakistan, South Korea, Perancis, Thailand, Mongolia, Jepang, Bangladesh, Cambodia, dan Amerika. Duta besar Portugal, Carlos Manuel Leitão Frota, yang negaranya akan menjadi tempat konferensi

CD tingkat menteri pada bulan Juli 2009 di Lisbon, hadir memberikan sambutan untuk pembukaan dan penutupan konferensi CD Non-pemerintah kali ini.

Beberapa topik konferensi yang dibicarakan pada pertemuan CD Non-pemerintah di Jakarta ini antara lain adalah: 1) Pelajaran dari Krisis Finansial Asia tahun 1997: dampak terhadap demokratisasi, 2) Dampak Politik dari Krisis Ekonomi saat ini, 3) Bagaimana mengartikulasikan ‘Peluang Demokrasi’ dalam konteks regional Asia, 4) Bagaimana mempertahankan pencapaian demokrasi pada masa krisis ini serta bagaimana mencari peluang-peluang untuk pengembangan demokrasi lebih lanjut, 5) Evolusi CD dan Peran-Peran Asia.

“

“YAPPIKA adalah salah satu mitra kami yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh wilayah kegiatan kami. Tim YAPPIKA membawa kapasitas dan antusiasme yang luar biasa dalam pekerjaannya, dan ini membuat banyak hal lebih mudah. Pada tahun 2009, kami sangat senang berkolaborasi pada penyelenggaraan the Asia Roundtable Community of Democracy di Jakarta. YAPPIKA adalah mitra penyelenggaraan acara yang superlatif! Kami sangat berharap dapat terus bekerja sama di masa depan.”

Bo Tedards, Coordinator, World Forum for Democratization in Asia

Upaya untuk Mengabarkan Pengalaman Terbaik Masyarakat Sipil Indonesia dalam Mengembangkan Demokrasi ke Forum Global



WFDA Seoul

Indonesia saat ini merupakan satu-satunya negara yang memiliki status “free” di Asia Tenggara menurut Indeks Kebebasan *Freedom House* tahun 2009. Dengan skor hak politik 2 dan skor kebebasan sipil 3, dimana skor mendekati 1 berarti kondisi semakin bebas, menjadikan Indonesia satu-satunya negara demokratis di Asia Tenggara. Bahkan Filipina yang sering menjadi contoh negara dengan praktek demokrasi paling baik di Asia Tenggara, hanya memperoleh status “partly free” menurut Indeks

Kebebasan *Freedom House*. Sayangnya, representasi Indonesia, terutama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) masih kurang dalam forum-forum demokrasi internasional, termasuk di wilayah Asia. Hal ini menyebabkan praktek-praktek demokrasi yang dikembangkan oleh masyarakat sipil di tingkat akar rumput tidak banyak diketahui dan belum menjadi pengetahuan yang meluas di tingkat regional. Ini menjadikan pihak luar melihat perkembangan demokrasi Indonesia baru dari sisi “bunga-bunganya” demokrasi berkaitan dengan prosedur, institusi demokrasi (seperti DPRD, parpol, lembaga peradilan/judisial, dll), dan beragam kebebasan (seperti yang tercermin pada Indeks Kebebasan *Freedom House*). Pihak luar belum banyak melihat praktek-praktek yang baik OMS dalam pemenuhan atau pencapaian demokrasi yang lebih substantif.

Hal di atas menjadi alasan kuat bagi YAPPIKA, dengan dukungan dari Yayasan TIFA, untuk hadir bersama aktivis OMS dari 6 lembaga lain dalam *WFDA Biennial Meeting and Global Forum on Modern Direct Democracy* di Seoul,

Korea Selatan pada tanggal 13-18 September 2009 yang lalu. Keenam lembaga tersebut adalah Lakpesdam NU, ICW, Demos, Cetro, KPPA, dan Yayasan TIFA. Kesempatan ini sangat berharga untuk mulai mengkapitalisasi aset-aset OMS dalam isu demokrasi ke tingkat global dan berkontribusi dalam memajukan demokrasi, mengenalkan pengetahuan dan praksis demokrasi Indonesia –baik keunggulan maupun kelemahan praktek demokrasi yang terjadi di Indonesia, dan membangun relasi dan jaringan untuk mendukung kelanjutan kerja-kerja dalam isu demokrasi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut YAPPIKA mempresentasikan status perkembangan Indonesia berdasarkan kerangka kerja aksi tahun

2007-2009 yang meliputi pelaksanaan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, aksi untuk membela HAM, mempromosikan akuntabilitas politik, mempromosikan peran perempuan dalam demokrasi dan proses politik, mempromosikan dialog dan kerja sama dalam isu perdamaian dan resolusi konflik, mendukung pemilu yang bebas dan adil, dan aksi orang muda untuk demokrasi, HAM, dan perdamaian. Selain itu, ICW juga menjadi salah satu narasumber untuk isu upaya-upaya masyarakat sipil dalam melawan korupsi.

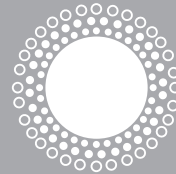
Dengan menghadiri acara-acara internasional seperti ini selain dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran dari negara lain, juga sangat bermanfaat untuk berjejaring di tingkat global.

“

"Banyak hal telah terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini, serta dalam Pemilu yang baru saja berlangsung. YAPPIKA memainkan peran penting dalam kancah pengembangan demokrasi di salah satu negara demokrasi terbesar di dunia."

Robert R. LaGamma (Council for a Community of Democracies (CCD)) dalam sambutan pembukaan *the Asia Roundtable Community of Democracy* di Jakarta tanggal 30 Mei 2009

Sinergi Kerja YAPPIKA dalam Kemitraan dengan Pihak Lain



Dalam mewujudkan visi dan misinya, YAPPIKA menjalankan berbagai program yang selalu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan lembaga lain maupun para individu. Selama tahun 2009, kemitraan yang telah kami bangun, di antaranya adalah:

Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh

YAPPIKA bekerjasama dengan USC Canada dan Canadian International Development Agency (CIDA) memberikan dukungan dana maupun asistensi teknis kepada 16 lembaga mitra di Nanggore Aceh Darussalam, yaitu:

1. **Banda Aceh:** *Aceh Development Fund* (ADF), *Inspiration for Managing People's Action* (Impact), Forum LSM Aceh, Kelompok Kerja untuk Transformasi Gender Aceh (KKTGA), *Acehnese Civil Society Organization Strengthening* (ACSTF)
2. **Kabupaten Aceh Besar:** Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR), Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Aceh (LPPM), Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani (YSPDI)
3. **Kabupaten Pidie:** Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA), Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Ekonomi Rakyat (PERAK)
4. **Kabupaten Bireun:** Bina Masyarakat (BIMA), Lembaga Swadaya Pembangunan Nasional (LSPENA)
5. **Kabupaten Aceh Jaya:** Masyarakat Transparansi Peduli Aceh Jaya (MATARAJA), Masyarakat Partisipasi Aceh Jaya (MP)
6. **Kabupaten Aceh Barat:** Flower Aceh Meulaboh, Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK) Yayasan Pembela Petani dan Nelayan (PAPAN)
7. **Kabupaten Singkil:** Yayasan Demokrasi untuk Negeri (DAUN), Rabithah Thaliban Aceh (RTA)

Advokasi RUU Pelayanan Publik

YAPPIKA bekerja sama dengan Yayasan TIFA melakukan advokasi RUU Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dimana YAPPIKA berperan sebagai sekretariat jaringan. Jaringan MP3 saat ini beranggotakan 33 lembaga yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Malang, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pemanfaatan IMS dalam Program ACCESS Tahap II

YAPPIKA bekerja sama dengan program ACCESS Tahap II melakukan penilaian Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di 8 Kabupaten (Goa, Takalar, Bau Bau, Buton Utara, Bima, Dompu, Timor Tengah Selatan/TTS dan Kupang) serta melakukan kaji ulang IMS di 8 kabupaten yang telah menjadi wilayah kerja program ACCESS tahap I (Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur)

Pelibatan Relawan

YAPPIKA melibatkan relawan, khususnya dari kalangan muda dalam kerja-kerja yang dilakukannya. Jumlah relawan yang aktif pada periode April 2009 – Desember 2009 sebanyak 20 orang. Sebagian besar relawan adalah mahasiswa dan atau fresh graduate dari 4 perguruan tinggi di Jakarta dan Depok.

Buku Terbitan YAPPIKA Periode April 2009 – Desember 2009

Buku "Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah, Pelajaran dari Aceh", Juni 2009, karya Soetoro Eko, Ferry Yuniver dan Nor Hiqmah



No. : PHHAAF/264/DW/SB/2010

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth,
Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09
Jakarta Timur 13350

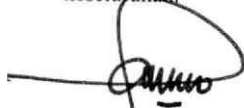
Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sesuai dengan catatan 9 atas laporan keuangan, YAPPIKA mencatat Aset tetap yang diperoleh dari dana hibah dan mencatat penyusutannya, meskipun belum memiliki surat hibah aset tetap dari donor.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.



Drs. Sifanto, Ak., MM
Izin Akuntan Publik No. 02.1.0798
Izin usaha KAP No. 1033/KM.1/2009

14 Juli 2010

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan**

Per 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2009	2008
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	4	1.452.625.775	1.541.999.250
Investasi	3b,5	777.502.711	380.999.350
Piutang program - bersih	3c,6	584.307.900	600.240.100
Piutang lain-lain	7	83.014.554	96.138.574
Uang muka	8	100.215.896	586.931.762
Jumlah aset lancar		2.997.666.836	3.206.309.036
Aset tidak lancar			
Aset tetap	3d,9		
Nilai perolehan		565.591.941	585.591.031
Akumulasi penyusutan		(554.550.178)	(577.086.613)
Jumlah aset tidak lancar		11.041.763	8.504.418
Jumlah aset		3.008.708.599	3.214.813.454

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2009	2008
Kewajiban dan aset bersih			
Kewajiban			
Kewajiban lancar			
Hutang lain-lain	10	215.388.137	402.333.791
Hutang pajak	11	2.688.929	77.094
Jumlah kewajiban lancar		218.077.066	402.410.885
Aset bersih			
Sisa dana	3e		
Terikat	12a	(76.407.933)	892.450.354
Tidak terikat	12b	2.867.039.466	1.919.952.215
Jumlah aset bersih		2.790.631.533	2.812.402.569
Jumlah kewajiban dan aset bersih		3.008.708.599	3.214.813.454

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan Aktivitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2009		2008
		Terikat	Tidak terikat	Jumlah
Penerimaan	13			
Penerimaan program		5.486.089.016	-	5.486.089.016
Penerimaan lain-lain			1.869.659.322	1.869.659.322
Jumlah penerimaan		5.486.089.016	1.869.659.322	7.355.748.338
Pengeluaran	14			
Canadian International Development Agency (CIDA)				
melalui USC Canada - CSO (Capacity Building in Aceh)		3.147.781.768		3.147.781.768
Canadian International Development Agency (CIDA) melalui Unity				
Service Committee of Canada (USC - Canada) - PPD Tahap II		-	-	-
ACCESS Bridging		-	-	-
Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ)		-	-	-
United Nations Development Programme (UNDP) - Assessment on International				
Assistance in Election 2009		39.081.500	-	39.081.500
Yayasan TIFA - Advokasi Pelayanan Publik		30.370.965	-	30.370.965
ACCESS Phase II		2.251.899.619	-	2.251.899.619
The Asia Foundation - CSIAP II		489.441.336	-	489.441.336
The British Embassy Jakarta		220.104.265	-	220.104.265
Taiwan Foundation for Democracy		191.317.574	-	191.317.574
Yayasan TIFA - WFDA Binneal Meeting in Seoul		77.445.726	-	77.445.726
Administrasi		-	922.572.071	922.572.071
Jumlah pengeluaran		6.447.442.753	922.572.071	7.370.014.824
Sisa dana, tahun berjalan		(961.353.737)	947.087.251	(14.266.486)
Sisa dana, awal		892.450.354	1.919.952.215	2.812.402.569
Pengembalian dana ke donor	12	(7.504.550)	-	(7.504.550)
Sisa dana, akhir		(76.407.933)	2.867.039.466	2.790.631.533
				2.812.402.569

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

	2009	2008
Arus kas dari aktivitas operasi		
Sisa dana, tahun berjalan	(14.266.486)	(1.294.312.261)
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		
Koreksi atas sisa dana	(7.504.550)	-
Penyusutan	7.478.565	8.797.708
Laba (rugi) investasi yang belum direalisasi	(396.503.361)	304.000.650
Penurunan (kenaikan) pada:		
Piutang program	15.932.200	(380.749.346)
Piutang lain-lain	13.124.020	118.710.223
Uang muka	486.715.866	679.931.089
Kenaikan (penurunan) pada:		
Hutang lain-lain	(186.945.654)	(42.049.988)
Hutang pajak	2.611.835	45.751
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(79.357.565)	(605.626.174)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Investasi	-	(685.000.000)
Perolehan aset tetap	(10.015.910)	(1.350.000)
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(10.015.910)	(686.350.000)
Penurunan dalam kas dan setara kas	(89.373.475)	(1.291.976.174)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	1.541.999.250	2.833.975.424
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	1.452.625.775	1.541.999.250